

**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN  
KOPERASI DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS  
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**



**Oleh:**

**ALFI KHAIRA**  
**NIM. 4022015001**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2020 M / 1441 H**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PERAN DINAS PERINDUSRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UMKM KOTA LANGSA**” atas Nama Alfi Khaira, NIM 4022015001 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 04 Januari 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 04 Januari 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I

(Dr. Safwan Kamal, M.E.I)  
NIDN. 2018059002

Penguji II

(Zulfa Eliza, M.Si)  
NIDN. 2003048502

Penguji III

(Fahriansah, Lc. MA)  
NIDN. 2116068202

Penguji IV

(Muhammad Firdaus, Lc. MA)  
NIP. 19850508 201803 1 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa,



(DR. Iskandar, MCL)  
NIP. 19650616 1995031 002

## PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

### “PERAN DINAS PERINDUSRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UMKM KOTA LANGSA”

Oleh:

Alfi Khaira

Nim. 4022015001

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Langsa, 12 Januari 2020

Pembimbing I



Dr. Iskandar, MCL

NIP. 19650616 1995031 002

Pembimbing II



Zulfa Eliza, M.Si

NIDN. 2003048502

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Fahriansah, Lc. MA

NIDN.2116068202

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Alfi Khaira

Nim : 4022015001

Tempat/tgl.Lahir : Langsa 06 Agustus 1996

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln. Terminal Baru Paya Bujok Teungoh  
Kec. Langsa Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UMKM KOTA LANGSA”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 12 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan



**Alfi Khaira**

## MOTTO

“Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir”.

## PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada ibu dan Ayah, terimakasih atas segala curahan doa, kasih sayang, dukungan dan nasihat-nasihat yang tidak pernah berhenti menemani perjalanan hidupku.

Skripsi ini kubingkiskan untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku kepada ayahku dan, ibuku yang telah tulus dan ikhlas membesarkan, membiayai serta mendoakanku selalu. Yang sudah bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan anakmu yang malas ini, maaf sayatelat lulus, Semoga jerih payah, peluh keringatmu berbalas surge untukmu, serta senyum dan bangga kalian menjaditujuan hidupku. Semoga Allah SWT memuliakan kalian berduaa baik di dunia maupun di akhirat.
- ❖ Untuk Sahabatku yang senantiasa membantudan memberisemangat.
- ❖ Almamater kutercinta, Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman yang luar biasa.
- ❖ Serta seluruh pihak yang membantukuterutama dalam usahapenyelesaian skripsi ini .

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM Kota Langsa dan kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat Disperindagkop dalam meningkatkan produktivitas UMKM Kota Langsa. Penelitian ini jenis penelitian Lapangan, Populasi penelitian ini adalah Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian Bidang Usaha Kecil Menengah, pada Disperindagkop. Sampel penelitian ini adalah Ibu Nazaryanti, SE dan Ibu Hidayati, S.Ag. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu Fenomenologi dan Deskriptif Komparatif. Berdasarkan analisis hasil pengumpulan data mengenai Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Langsa, maka dapat disimpulkan bahwa Peran yang telah dilakukan oleh Disperindagkop dalam pemberdayaan dilakukan dengan bimbingan pelatihan untuk pelaku UMKM dan juga pemberian bantuan alat produksi guna peningkatan hasil produksi. Selain itu juga Disperindagkop ikut dalam mempromosi produk dan informasi yang dilakukan seperti pada ajang pameran dan acara-acara besar yang melibatkan pelaku UMKM yang ada di kota langsa. Faktor penghambat dalam peran Disperindagkop dalam peningkatan adalah masih banyaknya masyarakat yang masih belum mengenal produk hasil UMKM dan juga pelaku bisnis yang tidak terdaftar dan tidak mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Disperindagkop, sehingga menyebabkan belum tercapainya tujuan Disperindagkop secara sempurna yaitu mensejahterakan masyarakat.

## **ABSTRACT**

*This study aims to find out the role of Disperindagkop in increasing the productivity of Langsa City MSMEs and what obstacles are the disperindagkop inhibiting factors in increasing the productivity of Langsa City MSMEs. This research is a type of field research, the population of this study is the Head of Service, Secretary, Division Head, and Head of Sub Division of Small and Medium Enterprises, at Disperindagkop. The samples of this study were Ms. Nazaryanti, SE and Mrs. Hidayati, S.Ag. Data collection techniques were carried out using observation, interviews, and documentation and data analysis techniques in this study, namely Comparative Phenomenology and Descriptive. Based on the analysis of the results of data collection on the Role of the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and Small and Medium Enterprises in Langsa City, it can be concluded that the role that has been carried out by Disperindagkop in empowerment is carried out with training guidance for SMEs and capital assistance in the form of business capital loans with low interest with light conditions and also the provision of production equipment to increase production yields. Besides that Disperindagkop participated in the promotion of products and information such as at exhibitions and large events involving SMEs in the city of Langsa. The inhibiting factor in the role of Disperindagkop in increasing is that there are still many people who are still unfamiliar with the products of MSMEs and also unregistered business people and do not participate in training provided by Disperindagkop, so as to cause the Disperindagkop's objectives to be achieved, namely to prosper the community.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalammu'laikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulispanjatkankehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini,

shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Skripsi ini berjudul **“Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM Kota Langsa”**

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasamanya yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penulisan ini,

Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Ayah dan Mamak yang senantiasa memberikandukungan.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Iskandar, M.CI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Iskandar, M.CI selaku pembimbing pertama dan Ibu Zulfa Eliza, M.Si selaku pembimbing kedua yang

dengan penuh kesabaran dan keiklasan telah meluangkan waktu,  
tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.

5. Bapak Fahriansah, Lc. MA selaku kepala jurusan Ekonomi Syariah yang sudah sangat banyak membantu
6. Dosen dan staf pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
7. Teristimewa untuk para sahabat terutama Adil dan Aswita
8. Semuanya yang membentuk penulis selam ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,  
tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 06 Januari 2020

Penulis,

**ALFI KHAIRA**  
**4022015001**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.LatarBelakangMasalah.....	1
1.2.Rumusanmasalah.....	4
1.3.Tujuandanmafaatpenelitian.....	5
1.3.1.Tujuan.....	5
1.3.2.Manfaat.....	5
1.4. KerangkaTeori.....	6
1.4.1.Peran.....	6
1.4.2.Kendala.....	6
1.4.3. ProduktivitasUMKM.....	7
1.5.PenelitianTerdahulu.....	9
1.6.MetodologiPenelitian.....	13
1.7. TeknikAnalisis Data.....	16
1.8.SistematikaPembahasan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
2.1. PeranDisperindagkop Dan Produktivitas UMKM.....	18
2.1.1. PengertianPeran.....	18
2.2.Fungsi.....	20
2.3. Disperindagkop.....	21
2.3.1. PengertianDisperindagkop (Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi).....	21
2.3.2.TugasPokokdanFungsi.....	27
2.4 UMKM.....	29
2.4.1. Pengertian UMKM.....	29
2.4.2. Produktivitas UMKM.....	29
2.4.3. Tujuan dan Ciri-ciri UMKM.....	33
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
3.1.GambaranUmumLokasiPenelitian.....	34
3.1.1 GambaranUmum Kota Langsa.....	34
3.2GambaranUmumObjekPenelitian.....	36

3.2.1	Sejarah Disperindagkop.....	36
3.2.2	Visi&Misi.....	37
3.2.3	Struktur Organisasi.....	38
3.3	Peran Disperindagkop dalam meningkatkan UMKM Kota Langsa.....	40
3.3.1	Peran Disperindagkop Dalam Meningkatkan Produktivitas UKM Kota Langsa.....	41
3.4	Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.....	43
3.4.1	Pembinaan dan Kegiatan Promosi Yang Dilakukan Oleh Disperindagkop Kota Langsa.....	45
3.5	Hasil Wawancara dan Pembahasan.....	49
3.5.1	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah.....	49
3.5.2	Program-program Pemberdayaan Disperindagkop Dalam Meningkatkan UMKM Kota Langsa.....	52
3.6	Kendala Yang Menjadi Faktor Penghambat Disperindagkop Dalam Meningkatkan Produ ktivitas UMKM.....	54
3.7	Upaya Disperindagkop Kota Langsa Dalam Menghadapi Masalah Yang Ada Untuk Kedepannya.....	56
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
5.1	Kesimpulan.....	58
5.2	Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		

## **DAFTAR TABEL**

Tabel1.1 Perkembangan UMKM 2013-2018 Kota Langsa.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel1.3 Usaha Mikro Kecil danMenengahTahun2019 MenurutSektor.....	44
Tabel2.3Nama-namapelakuUMKM Yang MendapatkanBantuan.....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional Indonesia, oleh sebab itu pembangunan industri harus diarahkan untuk menjadikan industri yang mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Pembangunan sektor industri, tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri yang disebabkan oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda dunia, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional, serta meletakkan dasar-dasar membangun industri masa depan melalui kewirausahaan.

Kewirausahaan adalah usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen pengambilan risiko yang tepat, dan melalui keterampilan komunikasi dan manajemen untuk memobilisasi manusia, uang, dan bahan-bahan baku atau sumber daya lain yang diperlukan untuk menghasilkan proyek supaya terlaksana dengan baik untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat merupakan salah satu upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera dan produktif. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu memainkan peran

---

<sup>1</sup> Leonardus Saiman, *Kewirausahaan, Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 41

sebagai penggerak/pendorong dan *entrepreneurship* guna memacu pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Perubahan struktur perekonomian nasional dari sektor pertanian (primer) ke sektor industri dan jasa (tersier) menciptakan peluang usaha bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, terutama di bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri dan industri-industri lainnya, di mana UMKM dapat berfungsi subkontraktor, yang kuat dan efisien bagi usaha besar. Perubahan orientasi kebijakan investasi, perdagangan dan industri ke arah industri pedesaan/kampung dan industri berbasis sumber daya alam (SDA), terutama pertanian, kehutanan, pertambangan dan pariwisata serta kerajinan rakyat, tentu akan memberikan peluang bagi tumbuh dan kembangnya UMKM.

Sesuai dengan yang dikemukakan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa tujuan dari dibentuknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>2</sup> Maka perlu diupayakan peningkatan produktivitas UMKM serta untuk menjaga perusahaan agar tetap bertahan melalui berbagai bidang pendukung. Dalam upaya peningkatan ini, tidak jarang UMKM menemukan beberapa kendala diantaranya kurangnya modal usaha, lemahnya kemampuan manajerial, terbatasnya area pemasaran serta lemahnya daya saing. Sumber keunggulan daya saing terkini adalah inovasi dan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, (Jakarta: Republik Indonesia, 2008).

keaktivitas. Keunggulan bersaing berbasis inovasi dan kreativitas harus lebih diutamakan karena mempunyai daya tahan dan jangka waktu lebih panjang.<sup>3</sup>

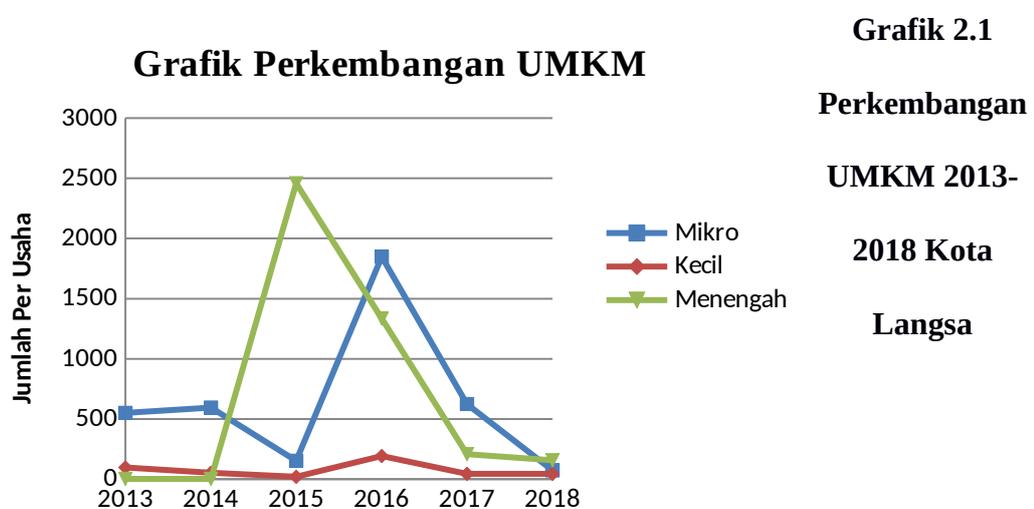
Adapun perkembangan UMKM dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Perkembangan UMKM 2013-2018 Kota Langsa**

No .	Kriteria UMKM	Tahun						Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mikro	551	595	151	1.849	624	72	<b>3.842</b>
2	Kecil	96	53	20	192	43	43	<b>447</b>
3	Menengah	1	1	2.460	1.335	208	156	<b>4.161</b>
<b>Total Jumlah</b>		<b>648</b>	<b>649</b>	<b>2.631</b>	<b>3.376</b>	<b>874</b>	<b>271</b>	<b>8.450</b>

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Langsa

Dari Tabel 1.1 dapat di lihat banyaknya terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan jumlah usaha baik itu mikro, kecil maupun menengah. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik berikut.



<sup>3</sup> Rizki Tri Prasetio, Dkk., *Upaya Peningkatan Produktivitas Umkm Melalui Implementasi Ict Pada Look At Hijab Bandung*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 Februari 2018, Hal. 105-106.

Dari grafik 1 dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangatlah kompleks yang meliputi berbagai macam indikator diantaranya, kurangnya modal usaha, lemahnya kemampuan manajerial, terbatasnya area pemasaran dan ketersediaan informasi didalam maupun diluar perusahaan. Dalam usaha peningkatan produktivitas UMKM di era teknologi informasi, ketersediaan informasi yang berkualitas memiliki peranan yang sangat penting sehingga UMKM dituntut untuk memperhatikan dan mengelola informasi dengan baik.

Belum dikenalnya produk UMKM oleh masyarakat yang diakibatkan oleh beberapa sebab yang salah satunya adalah kurangnya jaringan kerjasama yang dilakukan Industri Kecil Menengah (IKM) untuk mengembangkan industrinya. Maka dari itu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UMKM diharuskan melakukan kegiatan pameran demi mempromosikan produk UMKM yang secara tidak langsung menguntungkan pihak UMKM dan memberikan banyak jaringan kerjasama agar saling menguntungkan satu sama lain.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala Dinas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Drs.Zuhadisyah Sulaiman, M.SP menyatakan bahwa pada dasarnya pihak dinas telah menjalankan perannya untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Namun, dilihat kepada grafik 2.1 pada tahun 2014 sampai

2017 dan 2018 arah perkembangan produktivitas UMKM Kota Langsa berbalik arah setelah pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai

**“Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Langsa”.**

### **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diambil peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Disperindagkop Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM Kota Langsa?
2. Kendala Yang Menjadi Faktor Penghambat Disperindagkop Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM Kota Langsa?

### **1.3. Tujuan dan Mafaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan**

Merujuk pada rumusan masalah yang diambil, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran Disperindagkop dalam meningkatkan produktivitas UMKM Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui Kendala Apa saja yang menjadi faktor penghambat Disperindagkop dalam meningkatkan produktivitas UMKM Kota Langsa.

### **1.3.2. Manfaat**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bias memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut :

1. Bagi Disperindagkop

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta wacana baru bagi Disperindagkop sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang berguna untuk meningkatkan kinerja dan strategi untuk meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Langsa.

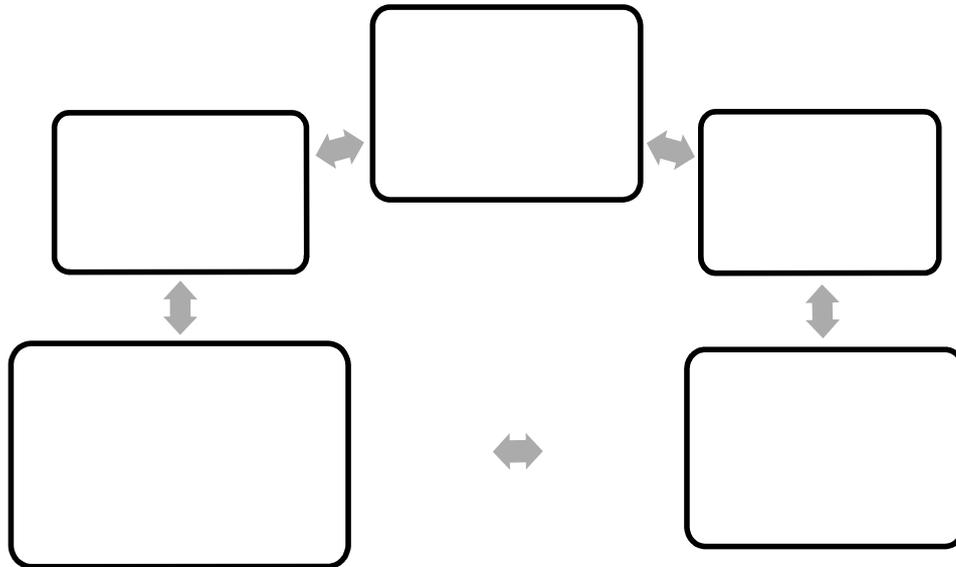
2. Bagi Lembaga IAIN Cot Kala Langsa

Sebagai sumbangan literatur untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan penalaran pengetahuan perpustakaan Cot Kala Langsa pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya.

3. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala pengetahuan dan wawasan baik dalam kondisi nyata maupun teori dan dihipkan dapat menjadi referensi untuk penelian selanjutnya.

#### 1.4. Kerangka Teori



##### 1. Peran

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, Peminpin di dalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa harapan sebagaimana penanggung peran berperilaku.<sup>4</sup>

Peran dari Disperindagkop yaitu :

1. Melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana potensi UMKM
2. Melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM
3. Menghimpun para UMKM untuk menjadi lebih berkembang

##### 2. Kendala

---

<sup>4</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan : dari Teori Ke Praktik*, Edisi Pertama, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 148

Seperti yang kita ketahui bahwa kendala ialah halangan, rintangan, factor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan, dan juga yang membatasi keleluasaan gerak sebuah benda atau suatu sistem.<sup>5</sup>

### **3. Produktivitas UMKM**

Produktivitas secara filosofi, dan menurut Dewan Produktivitas Nasional produktivitas merupakan sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa suatu kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Secara teknis produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan, dengan membandingkan jumlah yang dihasilkan dengan setiap sumber yang digunakan, produktivitas adalah ukuran yang menunjukkan pertimbangan antara input dan output yang dikeluarkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tugas pokok dan fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menghasilkan kemandirian dan pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Dalam konteks ini, peran pemerintah adalah sebagai berikut:

#### **1. Pemerintah sebagai Fasilitator**

Istilah fasilitasi digunakan untuk menyatakan suatu bentuk intervensi atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan dalam masyarakat. Dikalangan bisnis, konsep fasilitasi seringkali digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengenal

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Danang Sunyoto, *Teori, Kuesioner, dan Analisis Data Sumber Daya Manusia (Praktik Penelitian)*, (Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service, 2012)), hal. 41.

kebutuhannya. Dengan ungkapan lain, fasilitasi menjadi bagian penting dalam suatu kegiatan, program, atau organisasi untuk mempermudah proses belajar. Dalam konteks pembangunan, istilah fasilitasi biasa dikaitkan dengan pola pendampingan, pedukungan atau bantuan dalam masyarakat.

Pengertian fasilitasi, Secara harfiah merujuk pada upaya memberikan kemudahan, kepada siapa saja agar mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Biasanya tindakan ini diikuti dengan pengadaan personil, tenaga pendamping, relawan atau pihak lain yang berperan memberikan penyuluhan, penerangan, bimbingan, terapi psikologis penyadaran agar masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu dan sadar untuk berubah.

## 2. Pemerintah sebagai Regulator

Fungsi pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan, sehingga mempermudah industri kecil dalam mengembangkan usaha. Selaku regulator, pemerintah berfungsi menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif dalam keberlangsungan investasi sesuai peraturan perundangundangan

## 3. Pemerintah sebagai Motivator

Fungsi Pemerintah Daerah sebagai motivator adalah sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada para pelaku-pelaku industri kecil, agar usaha-usaha yang ada diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pelatihan-pelatihan atau lazim disebut Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan

pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku masyarakat dan aparaturnya penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri.<sup>7</sup>

## 1.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Syifaudin 2017	Peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Serang.	Penelitian ini terkait dengan pengembangan dan peningkatan usaha agar bisnis dan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah industri perdagangan dan koperasi dan guna peningkatan kontribusi PDRB dan PAD, peningkatan promosi pemasaran dan kerjasama lembaga usaha perdagangan, menciptakan iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi dari program Dinas Perindagkop. <sup>8</sup>
2	Surya Abraham 2016	Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan	Penelitian ini bertujuan untuk mengukur peran apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah

<sup>7</sup> Surya Abraham, *Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat*, Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 3, 2016, hal. 1047-1048

<sup>8</sup>Syifaudin, *Peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Serang*, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, (Banten: Sultan Maulana Hasanuddin, 2017)

		Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Industri Kecil di kampong Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat dalam memberdayakan industri kecil, dan untuk mengetahui actor apa sajakah yang terjadi penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan Industri kecil di Kabupaten Kutai. <sup>9</sup>
3	Siti Nurhayati 2012	Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Mengembangkan Industri Kecil Menengah Di Kota Surakarta	Hasil penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Disperindag dalam mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Surakarta dan apa saja Kendala- kendala yang dihadapi Disperindag dalam mengembangkan IKM di Kota Surakarta. Dan dari hasil pengamatan diketahui bahwa perkembangan IKM di Kota Surakarta meningkat seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat yang bervariatif. Disperindag memberikan pembinaan, pengawasan dan sekaligus

<sup>9</sup>Surya Abraham, *Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat*, Journal Ilmu Pemerintahan, 2016)

			<p>sebagai fasilitator terhadap IKM baru. Dimana Disperindag melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan industri dalam menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan, dan mengusahakan peningkatan serta pengembangan kerja sama tersebut.<sup>10</sup></p>
4	Iskandar 2015	<p>Perananan Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjung Pinang Dalam Peningkatan Kualitas Pengembangan Koperasi Di Kota Tanjung Pinang</p>	<p>Hasil dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peranan dinas pasar, koperasi dan UMKM kota Tanjungpinang dalam peningkatan kualitas penegembangan koperasi di kota Tanjungpinang tahun 2014 belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari dalam pembinaan dibutuhkan pegawai yang memiliki pengetahuan yang baik khususnya tentang usaha kecil menengah kota Tanjungpinang.<sup>11</sup></p>
5	Titin	Perananan Koperasi	Tujuan dari penenlitan ini adalah

<sup>10</sup>Siti Nurhayati, *Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Di Kota Surakarta*, Skripsi Program Diploma III Manajemen Administrasi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012)

<sup>11</sup> Iskandar, *Peranan Dinas Pasar, Koperasi Dan UMKM Kota Tanjungpinang Dalam Peningkatan Kualitas Pengembangan Koperasi Di Kota Tanjungpinang*, Skripsi Program Studi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (TanjungPinang: Universitas Maritim Raja Haji, 2015)

	Marvani 2010	Simpan Mitra Mandiri Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil dan Menengah Genteng dan Batu Bata Di Kecamatan Mojolban.	untuk mengetahui keadaan social ekonomi masyarakat di sekitar lokasi koperasi, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penduduk kecamatan mojolaban yang berada diusia produktif memiliki presentase yang lebih besar dibandingkan denagn penduduk usia non produktif. <sup>12</sup>
--	-----------------	--	--

### 1.5.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

1. Dari penelitian yang pertama persamaannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan untuk mengetahui peranan Disperindagkop. Sedangkan perbedaannya yaitu fokus penelitian yang dilakukan oleh Syaifaudin terhadap tingkat pendapatan UMKM yang akhirnya diketahui bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antar peranan Disperindagkop terhadap tingkat pendapatan UMKM sangat rendah.
2. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan meneliti tentang peranan Disperindagkop. Dan Perbedaannya ialah penelitian ini meneliti factor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan Industri kecil di Kabupaten kutai.

---

<sup>12</sup> Titin Marvani, *Peranan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Dan Menengah Genteng Dan Batu Bata Di Kecamatan Mojolban*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010)

3. Persamaan dari penelitian ini ialah sama meneliti tentang peran Disperindagkop perbedaannya dan kendala-kendala yang dihadapi Disperindagkop dalam mengembangkan Industri kecil menengah. Sedangkan perbedaannya ialah dari penelitian ini tidak ada yang secara spesifik melakukan pengidentifikasian peran Disperindagkop dalam meningkatkan produktivitas UMKM.
4. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama pendekatan kualitatif, yang meneliti peran dalam peningkatan dan pengembangan, sedang perbedaannya ialah yang diteliti peran koperasi dan UMKM dalam peningkatan kualitas pengembangan koperasi.
5. Persamaan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja peran untuk meningkatkan produktivitas UKM, sedangkan perbedaannya yaitu peranan koperasi bukan peranan Disperindagkop.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana Peran Disperindagkop dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Diskriptif Kualitatif*. Informasi dari penelitian ini dikumpulkan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dari berbagai hasil yang telah dilaksanakan oleh Disperindagkop & UMKM.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di Kota Langsa dan bertempat di Disperindagkop Kota Langsa.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah keseluruhan atau universum dari pada objek penelitian yang ada.<sup>13</sup> Populasi juga wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek karakteristik yang ada pada penelitian.

Objek penelitian penelitian ini adalah Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bagian, dan Sub Bagian Bidang Usaha Kecil Menengah, pada Disperindagkop serta para pelaku UMKM Kota Langsa.

### 4. Narasumber

Narasumber ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi.<sup>14</sup> Jadi sampel adalah kelompok kecil dari populasi yang diambil dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan.

Perwakilan dari sampel penelitian ini adalah para pelaku UMKM Kota Langsa.

### 5. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Lapangan dimana lokasi penelitian tersebut dilakukan di Kota Langsa dan Disperindagkop Kota Langsa yang beralamat di Jl. Panglima Polem No. 4, kode Pos 24415.

---

<sup>13</sup><http://dosensosiologi.com/contoh.populasi/> diakses tanggal 27 Desember 2019

<sup>14</sup><http://www.karyatulisku.com/2017/10/contoh-populasi-dan-sampel-penelitian.>

## 6. Jenis Data

- Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer menurut Sangadji dan Sopiah<sup>15</sup>, adalah data yang secara langsung dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari responden. Sumber data primer berasal dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak Disperindagkop dan UMKM yang dibagikan dalam bentuk angket.

- Data Sekunder

Selain data primer digunakan pula data sekunder yang berasal dari dokumen/publikasi/laporan tahunan dan catatan-catatan yang berkaitan dan menunjang penelitian<sup>16</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa sumber-sumber kepustakaan atau buku yang menjadi bahan dan data-data lain yang diperlukan terkait penelitian ini.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- Observasi, peneliti disini bertindak sebagai partisipan dan dilaksanakan secara terus terang dimana objek dari observasi penelitian adalah Disperindagkop dan UMKM yang terletak di kota Langsa dimana peneliti melakukan wawancara secara langsung dan melalui pesan Whatshaap

---

<sup>15</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hal. 190

<sup>16</sup> Dani Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 13.

dikarenakan objek dari penelitian lebih mudah menjawab pertanyaan melalui pesan Whatshaap.

- Wawancara menurut Singarimbun dan Effendi<sup>17</sup> adalah suatu proses interaksi dan komunikasi tanya jawab dalam rangka mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Menurut Soeratno<sup>18</sup>, wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (komunikasi langsung) dengan responden. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab pihak Dinas Disperindagkop & UMKM. Pada penelitian ini teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam maksudnya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian bisa terkumpul secara maksimal sedangkan subjek peneliti dengan teknik *Purposive Sampling* yakni pengambilan sampel bertujuan, sehingga memenuhi kepentingan peneliti.
- Dokumentasi, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Dokumen digunakan untuk mengacu atau bukan selain pada rekaman, yakni tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti: catatan khusus, foto-foto dan lain sebagainya. Sedangkan Rekaman berasal dari setiap tulisan/ Pernyataan yang dipersiapkan atau untuk individual atau kelompok dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa.

---

17 Masri Sofian Effendi Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 194

18 Soeratno Arsyad, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1998), hal. 86.

### 1.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Fenomenologi dan *Deskriptif Komparatif*. Fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas sosial yang tampak, meneliti langsung kelapangan dengan berinteraksi langsung pada objek penelitian. Deskripsi Komparatif yaitu mendeskripsikan kondisi lapangan yang dapat dilihat pada gambaran objek penelitian, kemudian data lapangan tersebut dikomparasikan dengan tinjauan pustaka yang telah disusun sebagai tolak ukur penelitian nantinya. Kemudian dilakukan pengorganisasian data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan dari penelitian untuk dibagikan kepada orang lain. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

### 1.8. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi dalam 4 bab yang secara garis besarnya bab demi bab disusun sebagai berikut:

- BAB I: Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kerangka Teori, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II: Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yaitu Peran Disperindagkop dan Produktivitas UMKM
- BAB III: Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang gambaran umum

- Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop)
- BAB IV: Bagaimana Pengaruh Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan Faktor-Faktor apa saja yang menghambat Diperindagkop dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM.
- BAB V Dalam bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Produktivitas UMKM

##### 2.1.1. Pengertian Peran

Peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan teori peran. Meski kata 'peran' sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoretis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahulu teori peran.<sup>19</sup>

Menurut Veithzal Rivai peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peminpin di dalam organisasi

---

<sup>19</sup> Micelle J. Hindin, "role theory" in George Ritzer (ed.) The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Blackwell Publishing, 2007, 3959-3962

mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa harapan sebagaimana penanggung peran berperilaku.<sup>20</sup>

Pengertian Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi ( ketentuan ) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Soerjono Soekanto pengertian peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>22</sup>

Konsep tentang peran (role) menurut Komarudin dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut.<sup>23</sup>:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata

---

<sup>20</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan : dari Teori Ke Praktik*, Edisi Pertama, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 148.

<sup>21</sup> Marilyn M. Friedman, *Keperawatan Keluarga :Teori dan Praktik*, (Jakarta : EGC, 1998), hal. 286.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal.243.

<sup>23</sup> Komarudin, *Ensiklopedi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal.786.

4. Fungsi yang di harapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab-akibat

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di ambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sebagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab-akibat.

## **2.2. Fungsi**

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal<sup>24</sup>, yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal<sup>25</sup>, yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Tugas Pokok Disperindagkop-UKM Kecamatan Kota Langsa yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi

---

<sup>24</sup> Nining Haslinda Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, (Makassar : FISIPO, 2008), hal. 22.

<sup>25</sup> *Ibid.*

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dimana dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Disperindagkop-UKM Kecamatan Kota Langsa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.3. Disperindagkop**

#### **2.3.1. Pengertian Disperindagkop (Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi)**

##### 1. Perindustrian

Industri adalah berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan baik oleh perorangan maupun organisasi atau perusahaan.<sup>26</sup> Hasil industri bukan hanya berupa barang, tetapi juga berbentuk jasa. Industri sering disamakan dengan manufaktur, padahal kedua istilah tersebut berbeda. Istilah manufaktur berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to manufacture* yang berarti kegiatan memproses bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, lalu menjadi barang jadi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Yeti Sumaryati, *Menerapkan Prinsip Professional Kerja SMK Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen*, (Bandung: CV Armico, 2010), hal.1.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal. 2

Saat ini beragam industri dapat kita temui. Untuk memudahkan kita, kesemua jenis industri tersebut dapat digolongkan atau diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Klasifikasi industri berdasarkan hubungan vertical

Hubungan vertikal dalam sebuah industri adalah hubungan yang terjadi akibat adanya penggunaan produk akhir suatu kelompok perusahaan sebagai bahan baku oleh kelompok perusahaan lain. Hubungan vertikal terdiri atas industri hulu dan hilir.

1) Industri Hulu

Industri hulu adalah perusahaan yang membuat produk yang dapat digunakan sebagai bahan baku oleh perusahaan lain.

2) Industri Hilir

Industri hilir adalah kelompok perusahaan yang menggunakan produk perusahaan lain sebagai bahan baku untuk kemudian diproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi, antara industri hulu dan industri hilir terdapat kaitan yang sangat erat. Dalam hal ini, produk dari industri hulu menjadi bahan baku pada industri hilir untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi lain atau barang setengah jadi lain.

b. Klasifikasi industri berdasarkan hubungan horizontal

Hubungan horizontal dalam suatu industri adalah hubungan sejajar antara beberapa produk yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dalam kelompok industri yang sama. Sebagai penjelasan.

- 1) Perusahaan X1 memproduksi tekstil dari kapas
- 2) Perusahaan X2 memproduksi tekstil dari bahan ool
- 3) Perusahaan X3 memproduksi tekstil dari bahan katun

Ketiga perusahaan X1, X2, dan X3 dikatakan memiliki hubungan horizontal.

c. Kriteria UMKM berdasarkan skala usahanya

Besar kecilnya usaha bisnis ditentukan oleh besar kecilnya modal yang ditanamkan. Perbedaan Usaha Kecil, Menengah, Mikro dan Klasifikasi industri berdasarkan skala usaha dapat dibagi menjadi 3 kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan<sup>28</sup>. Industri skala usaha kecil (*small scale industry*) modal yang ditanamkan antara Rp10 juta sampai dengan Rp 50 juta.
- 2) Usaha menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar<sup>29</sup>. Industri skala usaha menengah (*small scale industry*) modal yang ditanamkan antara Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta.

---

<sup>28</sup> <http://kajianpustaka.com/2013/01/usaha-mikro-kecil-dan-menengah>. Diakses pada tanggal 10 januari 2020

<sup>29</sup> <http://akutansifreeline.com/2013/05/definisi-pengertian-usaha-mikro-usaha>. Diakses pada tanggal 10 januari 2020

3) Usaha Mikro ialah usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat<sup>30</sup>. Industri skala usaha besar (*small scale industry*) modal yang ditanamkan diatas Rp 500 juta.

d. Klasifikasi industri berdasarkan tingkat jenis produksinya

Berdasarkan tingkat jenis produksi, industri dapat digolongkan menjadi 3:

1) Industri Ringan

Jenis industri ringan adalah kelompok perusahaan yang memproduksi barang-barang konsumsi. Misalnya industri makanan, ternak, industri tepung, industri minuman dalam botol, industri makanan dalam kemasan, dll.

2) Industri Menengah

Yang termasuk Industri menengah antara lain industri ban mobil, industri semen, industri kimia, industri farmasi dll.

3) Industri Berat

Yang termasuk industri antara lain industri pembuatan traktor, pembuatan mesin mesin mobil, industri pembuatan pesawat terbang, industri satelit, industri eksplorasi tambang didasar laut, dll.

---

<sup>30</sup><http://abstraksi.ekonomi.com/2013/12/pengertian-umkm-usaha-mikro-kecil-dan-menengah>. Diakses pada tanggal 10 januari 2020

e. Jenis industri berdasarkan produktivitas perorangan

1) Industri Primer

Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu.

2) Industri Sekunder

Industri sekunder adalah industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang-barang yang dapat diolah kembali (barang setengah jadi).

3) Industri Tersier

Industri tersier adalah industri yang menghasilkan produk berupa layanan jasa.<sup>31</sup>

2. Perdagangan

Perdagangan ialah bertemunya antara penjual dan pembeli, menurut istilah *syara'* jual-beli (*ba'i*) ialah : menerima hasil penjualan suatu barang berdasarkan *syara'*, atau hanya manfaat yang diperkenankan *syara'*, dengan melalui pembayaran yang berupa uang.<sup>32</sup>

Dari Ibnu Umar r.a ketika Nabi ditanya: Usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya-sendiri dan semua jual beli yang baik.

3. Koperasi<sup>33</sup>

Koperasi adalah berbeda beda dan menimbulkan diskusi-diskusi yang tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh ideologi tertentu Koperasi berasal dari

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal. 2-7

<sup>32</sup>Syekh Syamsudin Abu Abdillah, *Fathul Qarib Pengantar Fiqh Imam Syafe'I Terj.* (Surabaya: Tim Grafis Mutiara Ilmu, 2010), hal. 165.

<sup>33</sup>Sohari, dkk., *Hadis Tematis*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), hal. 83

kata cooperation yang artinya kerja sama. Pengertian yang dipengaruhi ideologi suatu Negara misalnya pengertian koperasi di Indonesia dikemukakan pada undang-undang dasar republik Indonesia.<sup>34</sup> Menurut UU nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian didalam pasal 3 dikemukakan mengenai pengertian koperasi, yaitu: koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berawak sosial, beranggota orang-orang, atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi rakyat sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>35</sup>

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam Bab I, Pasal I, ayat I dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>36</sup>

Jadi dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) adalah dinas yang memberdayakan UMKM Namun menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 yang disebut dengan usaha mikro adalah entitas yang memiliki kriteria kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta.<sup>37</sup>

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>34</sup>Tiktik Sartika Portomo, *Ekonomi Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 12.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal. 13

<sup>36</sup>Saiful Bahri dan Afif, *Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta:Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), hal. 39

<sup>37</sup>Murpi Sollehudin, *Bisnis Plan Praktis dan Dahsyat untuk UMKM*, (Bekasi : Laskar Askara, 2007), hal. 3

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>38</sup>

### **2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan segala urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM berupaya berperan dalam produktivitas produk pelaku UMKM agar dapat menjalankan usahanya untuk memperoleh kesuksesan dan kemajuan dan dengan tujuan agar produk tersebut dapat dikenal oleh masyarakat sekitar dan di luar kota Langsa.

---

<sup>38</sup> A. Zarkasi Effendi, et.al., *Demokrasi Ekonomi: Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*, (Malang: Averroes Press, 2012), hal. 20.

Berdasarkan rencana kerja Disperindagkop & UKM mempunyai fungsi melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Daerah mempunyai tugas :

1. Penyusunan dan pengendalian program dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah
3. Pelaksanaan kerjasama perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah serta pengembangan ekspor daerah
4. Fasilitas, pembinaan, perlindungan, pemasaran, dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah
5. Pemberian perijinan dan rekomendasi perijinan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah
6. Pelaksanaan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.
7. Fasilitasi kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.
8. Pemberdayaan sumberdaya dan mitrakerja dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.
9. Pelaksanaan ketatausahaan.

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

## **2.4. UMKM**

### **2.4.1. Pengertian UMKM**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, dalam BAB I (Ketentuan Umum), Pasal 1:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka

merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>39</sup>

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan

---

39

Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 18

mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.<sup>40</sup>

#### **2.4.2. Produktivitas UMKM**

Secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata (barang-barang atau jasa) dengan input yang sebenarnya. Suatu organisasi perusahaan perlu mengetahui pada produktivitas mana perusahaan itu beroperasi agar dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya di pasar global yang amat kompetitif. Salah satu indikator utama dalam menilai kemampuan bersaing suatu perusahaan adalah dengan melakukan pengukuran produktivitas.<sup>41</sup>

Apabila ukuran keberhasilan produksi hanya dipandang dari satu sisi, maka produktivitas dipandang dari dua sisi sekaligus, yaitu : sisi input dan sisi

---

<sup>40</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 11

<sup>41</sup> Yolandha Angelica Agry Culturianingtyas, Panji Deoranto dan Dhita Morita Ikasari, *Analisis Produktivitas Dengan Metode Multi Factor Productivity Measurement Model (MFPMM)*, Jurnal Industria, Volume 3, Nomor 1, Hal 33-42.

output. dengan demikian dapat dikatakan bahwa produktivitas berkaitan dengan efisiensi penggunaan input dalam memproduksi output (barang dan jasa).

#### 2.4.2.1. Faktor-Faktor Determinan Produktivitas

Banyak hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa Produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu:

1. *Knowledge*
2. *Skills*
3. *Abilities*
4. *Attitudes*
5. *Behaviors*

Klingner dan Nanbaldian menyatakan bahwa produktivitas merupakan fungsi utama perkalian dari usaha pegawai (*effort*) yang didukung dengan motivasi yang tinggi, dengan kemampuan pegawai (*ability*), yang diperoleh melalui latihan-latihan. Produktivitas yang meningkat berarti performansi yang baik akan menjadi *feedback* bagi usaha, atau motivasi pekerjaan pada tahun berikutnya. Selain keterkaitan produktivitas dengan usaha dan kemampuan sumber daya manusia, produktivitas juga memiliki hubungan keterkaitan dengan efisiensi, efektivitas, dan kualitas.<sup>42</sup>

Adapun fungsi-fungsi kepegawaian yang utama adalah pengadaan alokasi, pengembangan, dan hukuman dari sumber daya manusia pengembangan pegawai secara historis kurang mendapat perhatian. Fungsi pengembangan pegawai memusatkan perhatian pada peningkatan kemampuan dan motivasi dari para

---

<sup>42</sup> Toni Setiawan, *Panduan Sikap dan Perilaku Entrepreneurship Kiat Sukses Menjadi Pengusaha*, (Jakarta: Oryza, 2012), hal. 150.

pegawai pemerintah untuk bekerja. Fungsi pengembangan melengkapi fungsi pengadaan, yang menandakan usaha awal dari seorang majikan untuk menyeleksi orang berdasarkan kemampuan dan factor-faktor lain yang akan berpengaruh terhadap kinerja para pekerja selanjutnya.

#### **2.4.3. Tujuan Dan Ciri-Ciri UMKM**

Karakteristik Usaha Mikro Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **3.1.1 Gambaran Umum Kota Langsa**

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syari'at Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner makanan, dan kota wisata. Dalam perspektif "oral tradition", Kata Langsa berasal dari pertikaian antara Kerajaan Elang dan Kerajaan Angsa dalam memperebutkan dan mempertahankan wilayah teritori guna memperoleh ikan, hingga terjadi peperangan sebanyak dua kali yang berakhir dengan gencatan senjata serta perundingan tersebut mereka namakan dengan nama "Langsar" atau elang besar dan kemudian menjadi kata Langsa pada saat ini.

Pada masa kolonial Belanda hingga awal Kemerdekaan Indonesia, Langsa memiliki peran yang strategis sebagai penyedia barang-barang ekspor (barter) dan impor (khususnya peluru senjata bekas sekutu yang dijual murah disingapura). Dan dengan infrastrukturnya pada masa itu, Langsa merupakan salah satu kota dagang dan perniagaan sepanjang sejarah. Kota Langsa merupakan pemekaran dari kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa sebelumnya berstatus sebagai Kota Administratif (KOTIF) yang kemudian menjadi Kota Langsa. Landasan yuridis pembentukan Kota Langsa adalah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 yang diresmikan pada tanggal 21 juni 2001.<sup>43</sup>

Kota Langsa memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Aceh Tamiang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan kabupaten Aceh Tamiang,sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.

Secara administratif Kota Langsa terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang terdiri dari : Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Baroe dan Kecamatan langsa Lama, yang membawahi sebanyak 66 (enam puluh enam) Gampong.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Langsa, Jumlah penduduk Kota Langsa tahun 2016 berjumlah 168.820 (seratus enam puluh delapan ribu, delapan ratus dua puluh) Jiwa, sementara pada Tahun 2017 berjumlah 171.574 (seratus tujuh puluh satu ribu, lima ratus tujuh puluh empat) jiwa, meningkat dengan tingkat pertumbuhan 1,73 % (satu koma tujuh puluh tiga persen).

Adapun sektor unggulan yang dimiliki oleh Kota Langsa adalah :

1. Pariwisata,
2. Perdagangan,perhotelan dan restoran,
3. Industri, sektor pertanian tanaman pangan,
4. Perikanan dan kelautan, serta sektor perkebunan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup><http://pariwisata.langsakota.go.id/2018/10/sejarah-singkat-kota-langsa/> diakses pada tanggal 28 Desember 2019

## 3.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

### 3.2.1 Sejarah Disperindagkop

Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM Kota Langsa adalah instansi pemerintah Kota Langsa yang dibentuk berdasarkan peraturan Qanun tentang pembentukan dan susunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kota Langsa.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa, dibentuk berdasarkan qanun kota langsa No. 04 Tahun 2008, pada tanggal 27 Oktober 2008. Terbentuknya susunan tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kota Langsa. Terbentuknya qanun tersebut untuk melaksanakan pelayanan terhadap pengembangan peningkatan kapasitas aparatur, masyarakat dan khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat.<sup>45</sup>

Dinas perindustrian perdagangan koperasi dan UKM sebagai Pembina dan pengembang usaha kecil dalam menjalankan tugasnya, berperan sebagai fasilitator atau penyedia layanan dalam memberikan pelatihan-pelatihan yang bertujuan meningkatkan usaha mikro kecil menengah yang ada di kampong-kampung. Pada umumnya sumber daya yang dimiliki oleh pelaku industri kecil masih relative sederhana dan bersifat tradisional, terutama disektor pengetahuan produksi dan manajemen sehingga pelaku industri sulit lepas dari kesulitan-kesulitan untuk menuju tahap lepas landas.

---

<sup>45</sup> Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa

Sumber daya manusia dari pelaku industri kecil masih sangat minim pengetahuan dan pemahaman akan manajemen industri, namun dengan adanya seminar dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pihak dinas dapat membuat para pelaku industri kerajinan menjadi lebih mengerti bagaimana menjalankan usaha dan mengelola usaha tersebut agar hasil usaha yang mereka tekuni dapat menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi. Pelaku industri kecil diberikan pelatihan-pelatihan serta seminar pengetahuan dan wawasan teknis dan non teknis mengenai kerajinan.<sup>46</sup>

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Langsa berada dipusat pemerintah Kota Langsa yaitu di jalan Panglima Plem Komplek Perkantoran No.04 Langsa Telp. 0641- 425213.

Tugas pokok Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Langsa adalah menyelenggarakan urusan wajib pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali Kota Langsa untuk melaksanakan pelayanan masyarakat yang ada di wilayah Kota Langsa.

### **3.2.2 Visi & Misi**

#### **Visi**

“Terwujudnya peran industry, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah yang maju, kompetitif dan mandiri sebagai penggerak ekonomi”<sup>47</sup>

#### **Misi**

---

46 Panduan Pelatihan Anoraga, PdanSudanto.2002.koperasi,kewirausahaan,dan usaha kecil

47 Bidkop.com.thn.2012 diakses pada tanggal 22 Agustus 2019

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat
3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan

Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan, sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.<sup>48</sup>

### **3.2.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi yaitu sebuah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antar aktivitas dan fungsi dibatasi atau dapat dikatakan bahwa struktur organisasi merupakan suatu cara pembagian tugas pekerjaan yang kemudian dikelompokkan serta dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah perusahaan, terutama dalam mengatasi masalah sumber daya manusianya. Dengan demikian, penetapan struktur organisasi yang baik (yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan) dijadikan pedoman supaya perusahaan lebih

---

48 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa



**Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi  
dan Usaha Kecil Menengah**

Struktur organisasi Disperindagkop terdiri dari beberapa bidang yaitu bidang kesekretariatan, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Setiap bidang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing.

### **3.3 Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff penyusun rencana bimbingan teknis<sup>50</sup> Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengubah struktur perekonomian daerah kearah yang lebih baik, maju dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri kecil dan menengah pada khususnya.

Peran-peran Disperindagkop tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disperindagkop memberikan binaan terhadap pelaku UMKM
2. Disperindagkopkop melakukan pengembangan dan pengawasan terhadap pelaku UMKM
3. Disperindagkop juga memfasilitasi pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan-pelatihan, promosi melalui pameran, dan pemberian bantuan peralatan produksi.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Sri Yuliana, SE, penyusun rencana bimbingan teknis pada tanggal 21 agustus 2019.

4. Disperindagkop mewujudkan perkembangan industri kecil menengah kearah yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna.
5. Disperindagkop mewujudkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur.

Salah satu alasan utama Disperindagkop dalam mengembangkan Industri mikro, kecil dan menengah adalah potensi besarnya dalam memberi penyelesaian masalah tingginya tingkat pengangguran dikarenakan sempitnya kesempatan kerja. Alasan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat daya saing UMKM yang sumber daya manusianya sebagian besar berpendidikan menengah ke bawah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaku UMKM berinisial D di jenis produk terasi menyatakan:

“Peran disperindag sangat mempengaruhi UMKM, yaitu perindagkop juga memfasilitasi pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan-pelatihan, promosi melalui pameran, dan pemberian bantuan peralatan produksi. Dalam hal ini yang sangat dirasakan yaitu bantuan untuk mempromosikan jenis usaha terasi dengan pemberian label, terpal untuk menjemur terasi, dan juga alat untuk mengemas terasi UMKM bidang terasi.<sup>51</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara diatas penulis menganalisa bahwasanya peran Disperindagkop dalam membantu mempromosikan UMKM dengan berbagai cara salah satunya pemberian bantuan berupa label, lem dan terpal dalam memudahkan pelaku UMKM mempromosikan UMKM. Hal tersebut sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas UMKM, karena dengan adanya bantuan dari Disperindagkop sangat amat membantu para pelaku UMKM di Kota Langsa.

---

<sup>51</sup>Hasil wawancara pelaku UMKM berinisial D, Jenis Usaha terasi. Pada tanggal 14 Januari 2019

### **3.3.1 Peran Disperindagkop dalam Meningkatkan Produktivitas UKM**

#### **Kota Langsa**

Peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau derak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya.

Salah satu yang menjadi potensi di tiap daerah adalah keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM). UKM memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah maupun masyarakat lokal. Keberadaan UKM juga tidak terhindar dari masalah. Oleh karena itu diperlukan peran disperandigkop untuk meningkatkan produktifitas UKM.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai peran Diperindagkop dalam meningkatkan produktivitas UMKM terhadap salah satu Kepala Bidang Koperasi UMKM yaitu ibu Nazaryanti, S.E mengungkapkan :

“Peranan utama Disperindagkop terlibat dalam beberapa hal yaitu Disperindagkop sebagai stabilitator, peran pemerintah sebagai stabilitator sangat penting dan harus dimainkan secara efektif, inovator, peran pemerintah sebagai inovator dimana harus menjadi sumber hal-hal yang baru, modernisator, pemerintah bertugas mengarahkan masyarakat kearah kehidupan modern, pemerintah harus menjadi arah panutan disebut sebagai pelopor, dan pemerintah sebagai pelaksana.”<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Nazaryanti,S.E , Kabid Koperasi UMK pada tanggal 22 Agustus 2019

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu pelaku usaha UMKM yang berinisial C jenis usaha jeruk peras menyatakan:

“Dalam usaha peningkatan produktivitas UMKM di era teknologi informasi, ketersediaan informasi yang berkualitas memiliki peranan yang sangat penting. Oleh sebab itu pemerintah memegang peranan penting untuk menjadi pengaruh kepada pelaku UMKM dalam menghadapi era teknologi informasi.”<sup>53</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM tersebut menunjukkan bahwa terlihat peran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas UMKM Kota Langsa sangat penting untuk meningkatkan produktivitas UMKM.

### **3.4 Tujuan Disperindagkop**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff Dinas Perindustrian<sup>54</sup> Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Tujuan Disperindagkop dalam meningkatkan UMKM di Kota Langsa sebagai berikut :

- a. Mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan kelestarian lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap.
- c. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan serta aktif dalam pengembangan industri.

---

<sup>53</sup>Hasil melakukan wawancara kepada salah satu pelaku usaha UMKM yang berinisial C jenis usaha jeruk peras. Pada tanggal 14 Januari 2019

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Syarifuddin, R.ST, Pendamping Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 21 agustus 2019

- d. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan peranan koperasi industri sehingga pengangguran terminimalisir.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Selanjutnya tentang tujuan Disperindagkop dalam meningkatkan UMKM Kota Langsa berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu Staf Kasie Promosi Informasi yaitu Ulfa Rahmi, S.Si, M.Ed mengatakan :

“Tujuan penyelenggaraan Disperindagkop, antara lain; meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian, perdagangan dan pasar di daerah, mempromosikan/ memperkenalkan produk-produk daerah, menjaga dan menertibkan sektor perindustrian, perdagangan dan pasar di daerah”<sup>55</sup>

Seperti hasil wawancara dengan pelaku UMKM yang berinisial T yang menjalani usaha jus keliling. Pelaku usaha menyatakan bahwa:

“Tujuan Disperindagkop selama ini sudah mensejahterakan, meningkatkan dan memperluas jaringan usahanya dengan diberikan bimbingan, pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Disperindagkop selain saya diberikan pembinaan dan mengikuti pelatihan saya juga sudah mendapatkan bantuan dari pihak Disperindagkop berupa barang barang yaitu kulkas untuk menambahkan pasok jus yang akan didinginkan dimana sudah lama saya membuat proposal dan alhamdulillah sudah diberikan bantuannya .”

Oleh karena itu penulis berpendapat tujuan Disperindagkop dalam usaha meningkatkan UMKM yaitu membantu perkenomian masyarakat di sektor perindustrian, perdagangan dan pasar dengan memberikan bantuan modal

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Ulfa Rahmi, S.Si , Kasie Promosi Informasi pada tanggal 22 agustus 2019

barang yang diberikan pemerintah sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh responden, mengadakan pembinaan-pembinaan dan promosi produk yang berasal dari daerah langsa yang bertujuan agar dapat bersaing dengan produk-produk luar.

**Tabel 1.3 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Tahun 2017 menurut Sektor**

No	Menurut Sektor	Mikro	Kecil	Menengah
1	Perdagangan	817	2.207	343
2	Pertanian	1	29	31
3	Pertambangan	-	26	5
4	Industri	73	72	145
5	Perikanan	10	4	2
6	Transportasi	-	10	-
7	Peternakan	14	5	28

**Sumber data** : Daftar Rekapitulasi Database Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Tahun 2017 Provinsi Aceh Dalam Bahan Paparan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kumkm Tahun 2018 Oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Aceh

Dari table 2, dapat kita lihat bahwa sektor perdagangan sangatlah banyak dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Bagian inilah yang harus lebih ditingkatkan dikarenakan kebanyakan dari pelaku UMKM adalah masyarakat dengan pendidikan menengah dan kebawah. Dan dari keseluruhan itu semua, beberapa yang memiliki pikiran terbuka ingin ikut serta dalam pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh Disperindagkop sedangkan yang lainnya masih merasa ragu bahkan setelah adanya penyuluhan yang dilakukan oleh

Disperindagkop ke desa-desa yang memang berpotensi untuk menjadi produk unggulan.

#### **3.4.1 Pembinaan dan Kegiatan Promosi yang dilakukan oleh Disperindagkop kota Langsa**

Bidang Promosi dan Pemasaran adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang promosi, pemasaran dan pameran.

Bidang Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang promosi dan pemasaran;
2. penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang promosidan pemasaran;
3. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang promosi dan pemasaran, meliputi promosi, pemasaran dan pameran;
4. penyiapan bahan evaluasidan pelaporan bidang promosidan pemasaran;
5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Diperindagkop Kota Langsa telah melakukan beberapa kegiatan promosi untuk memperkenalkan UMKM yang ada di daerah Kota Langsa,

mempromosikan UMKM sehingga masyarakat mengetahui produk unggulan yang ada di Kota Langsa, mampu menaikkan pemasaran dan penjualan produk UMKM serta industri kreatif lainnya.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Drs. Zulhadisyah Sulaiman, M.SP mengungkapkan beberapa kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh Disperindagkop yaitu :

“Pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan promosi guna menampilkan produk-produk UMKM yang baik dipromosikan di ajang pameran dari tingkat provinsi maupuntingkat kota langsa seperti kegiatan Expo di Banda Aceh dengan menampilkan sekitar 12 UMKM yang menjadi produk unggulan dan tidak hanya kegiatan promosi, juga dilakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan tentang bagaimana potensi produktivitas dari UMKM dengan memberikan pendamping usaha sebagai pembinaan seperti yang dilakukan yaitu pembinaan tentang pengemasan produk yang rapi”<sup>56</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap satu Staf Promosi Ulfa Rahmi, S.Si, M.Ed

“Terdapat beberapa kegiatan promosi yang telah dilaksana yaitu Pemko Langsa melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) setempat, menggelar Langsa Mini Expo 2018 di pasar tradisional Kecamatan Langsa Lama, Dinas Koperasi dan UKM Aceh menggelar penyuluhan Perkoperasian bagi UKM Sentra Terasi Cahaya Gampong Kota Langsa. Kegiatan diadakan di Aula AMICO lantai II yang dihadiri oleh 20 (dua puluh) anggota Sentra UKM, dan turut dihadiri juga oleh Kepala Bidang Koperasi, Sekretaris dan Kepala Dinas Disperindagkop Kota Langsa tahun 2019, dan Langsa juga akan mengikuti Expo di Banda Aceh. Di sana nanti UMKM akan memamerkan berbagai produk asal Langsa”<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Drs. Zulhadisyah Sulaiman, M.SP, kepala Dinas Kota Langsa pada tanggal 22 agustus 2019

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan ibu Ulfa Rahmi, S.Si , Kasie Promosi Informasi pada tanggal 22 agustus 2019

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwasanya dengan adanya penyelenggaraan promosi melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Disperindagkop, bisa membantu para pelaku UMKM Kota Langsa untuk memamerkan dan mempromosikan barang produksinya agar diketahui luas oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan produksi dari barang tersebut.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap pelaku UMKM yang berinisial S jenis usaha terasi, menyatakan:

“Selama ini ketika barangnya sudah tersedia, kebanyakan bingung mau diapakan untuk menjualnya dengan cepat. Akibatnya langkah pemasaran dan promosi yang ditempuh cenderung konvensional, yakni dari mulut ke mulut atau sekadar memajang produknya di toko-toko,” dengan demikian kegiatan promosi yang dilakukan Disperindagkop sangat membantu dalam meningkatkan usaha. Karena dengan adanya kegiatan promosi ini dapat memperluas akses usaha dan juga dengan adanya bantuan label, cup pengemasan, fiber dari Disperindagkop sangat membantu proses promosi agar lebih berkualitas.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM tersebut menunjukkan bahwa Disperindagkop Kota Langsa melakukan upaya kegiatan promosi untuk memperkenalkan produk-produk yang berasal dari Kota Langsa.

**Tabel 2.3 Nama-nama Peserta UMKM Yang Mendapatkan Bantuan Dari Disperindagkop Kota Langsa**

N O	NAMA	NAMA PRODUK	JENIS PRODUK
1	Alfiansyah	Keripik Kembang Sari	Keripik
2	Aja Srikandi	Keripik Srikandi	Keripik
3	Anggraini	Reni Anggrek	Peyek
4	Chabsah Jumala	Kue Aneuk Mamplam	Kue Kering
5	Cut Kawal	Snack Lezat & Gurih	Peyek
6	Darmiati	Beulacan Asli Cap Mata Uroe	Terasi
7	Fadhilla	Abon Ikan Harapan Indah	Abon
8	Fahrul Ridha	Alba Kupi	Bubuk Kopi

<sup>58</sup>Hasil wawancara terhadap pelaku UMKM yang berinisial S jenis usaha terasi. Pada tanggal 14 Januari 2019

9	Fajri Indah Sari	Keripik Pisang Cap Mawar	Keripik
10	Firmansyah	Opak	Keripik
11	Junaidi	Keripik Mustika	Keripik
12	Juwita	Mak Yah	Kue Kering
13	Karina	Kue Ukueh Bak Ue	Kue Kering
14	M. Harun	Tachi	Terasi
15	M. Yusuf	Kopi Seulawah Dara	Bubuk Kopi
16	Mahdinur	Ampera Alba	Kue Kering
17	Mahfuza	Dendeng Jantung Pisang	Dendeng
18	Mis	Terasi Kak Mis	Terasi
19	Muammar Rizki	Abu Kopi	Bubuk Kopi
20	Mursidah	Meusekat Barona	Dodol Meusekat
21	Neni Fitriani	Berkah Asinan Salak Sunti & Pliek	Asinan
22	Nurjannah	Tape Semut Tiga Rasa	Tape
23	Nurlinawati	Ikan Kering Tawar Asli	Ikan Kering
24	Nursiah	Dodol Aceh	Dodol
25	Qamarudin	Manisan Kelapa	Manisan Kering
26	Rizka Maulana	Madu Almera	Sarang Madu
27	Sakdiah	Kerupuk Tempe	Kerupuk Tempe
28	Sarah	Bumbu Pecel Buk Sarah	Bumbu Pecel
29	Siska Marlina	Bunda Rangginang	Kerupuk
30	Sugianto	Bhoi	Bolu
31	Sulaiman B	Terasi Awaina	Terasi
32	Suriyonon Rais	Keripik Asam Manis Pedas	Keripik
33	Tuminah	Ana Rezky	Keripik
34	Wulan	Sambal Goreng Kriuk	Keripik
35	Yeni Triana	RM. Sinar Surya	Keripik
36	Raffi	Peyek Bayam Raffi	Keripik
37	Ridwan Said	Kerupuk Kulit Cap Rencong	Kerupuk

38	Marwani	Kue Marke Dua Putri	Kue Kering
39	Nurjannah	Gula Semut	Bubuk Gula
40	BUMG Kuala Maju	Kerupuk Mangrove	Kerupuk

Sumber Data: Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Langsa

### 3.5 Hasil Wawancara dan Pembahasan

#### 3.5.1 Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah

Secara khusus pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi yang diangkat oleh rapat anggota dengan tugas utama melakukan pengawasan intern terhadap koperasi pengawasan sendiri merupakan tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kesalahan tersebut.<sup>59</sup>

Prosedur pekerjaan seksi pembinaan usaha kecil dan menengah

1. Menyiapkan konsep penyusunan program kegiatan tahunan dengan mengumpulkan dan menganalisa program-program sebelumnya serta permasalahan yang dihadapi seksi pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

<sup>59</sup> <http://diskumkm.jabarprov.go.id/index.php/tupoksi-bidang-koperasi>

2. Memberikan bimbingan arahan dan petunjuk kerja kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas.
3. Melakukan pembagian tugas terhadap bawahan dengan cara membuat disposasi, penugasan agar bawahan memahami tugas dan tanggung jawab.<sup>60</sup>
4. Menyusun format pengumpulan data pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan cara mengumpulkan data informasi sebagai bahan pengambilan keputusan.
5. Menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi pemberdayaan usaha kecil dan menengah.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Kasie Pembinaan UKM Ibu Hidayati, S.Ag menyatakan :

“Disperindagkop dan UKM Kota Langsa melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) Pemasaran dan Kemasan Produk Industri Kecil Menengah (IKM) Menghadapi Era Revolusi Industri dilaksanakan di Aula Virta Tirta Raya Kota Langsa Kecamatan Langsa Barat dan sebanyak 20 pelaku UMKS se-Kota Langsa diberikan pembekalan kewirausahaan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh bersama Disperindagkop dan UKM Kota Langsa di Aula Hotel Kartika Langsa”<sup>61</sup>

Peneliti juga melakukan penelitian terhadap pelaku UMKM yang berinisial M jenis usaha yaitu kue kering dan kopi menyatakan:

“Bimbingan-bimbingan yang dilaksanakan oleh disperindagkop sangat membantu para pelaku UMKM kota Langsa dalam menjalankan usaha. Karena dengan adanya bimbingan-bimbingan teknis yang dilakukan dapat memberikan informasi kepada para pelaku UMKM untuk tuntutan kebutuhan di era revolusi kedepan”.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Diskoperindag.seruyankab.go.id/bidang-koperasi-dan-usaha-kecil-menengah/

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Hidayati, Sag, Kasi Pembina Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 21 agustus 2019

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis berpendapat bahwasanya pihak Disperindagkop menunjukkan bahwa Disperindagkop Kota Langsa melakukan kegiatan pembinaan dengan tujuan agar setiap produk dapat bersaing dengan produksi di daerah lainnya dalam era revolusi kedepannya dan juga dengan adanya bimbingan-bimbingan yang dilaksanakan bisa membantu para pelaku UMKM untuk lebih maju dan bisa mendapatkan ilmu agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi.

### **3.5.2 Program-program Pemberdayaan Disperindagkop Dalam Meningkatkan UMKM Kota Langsa**

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut. Konsep pemberdayaan yang dilakukan bertujuan pada pemberdayaan bidang ekonomi dan bidang sosial, dengan maksud kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil dan agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya.

Dengan bertitik tolak pada diberlakukannya otonomi daerah, wewenang pengembangan daerah dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara maksimal. Pemberdayaan UMKM di daerah harus dilakukan sebagai satu kesatuan dalam upaya pengetasan Kemiskinan di Kota

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan pelaku UMKM berinisial M, Jenis Usaha kue kering dan kopi. Pada tanggal 14 Januari 2019

Langsa. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah yang di laksanakan di Kota Langsa melalui 3 program yaitu bantuan dan perlindungan sosial, Pemberdayaan UMKM, pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan salah staf

Kasie Pembinaan dan Pengawasan Koperasi yaitu Ibu Sakdiah, SE menyatakan :

“Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah yang di laksanakan di Kota Langsa melalui 3 program yaitu bantuan dan perlindungan sosial, Pemberdayaan UMKM, Pemberdayaan masyarakat. program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan dan perlindungan sosial, Program penanggulangan kemiskinan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, program penanggulangan kemiskinan pemberdayaan masyarakat. Terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.”<sup>63</sup>

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pelaku UMKM yang berinisial S dengan jenis usaha kerupuk tempe, beliau menyatakan:

“Program pemberdayaan yang di lakukan Disperindagkop sangatlah baik, terutama dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Program aksi pengembangan sistem pendukung usaha bertujuan untuk mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UMKM terhadap sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, serta meningkatkan skala usahanya. Sasaran programnya adalah tersedianya lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif seperti sumber daya manusia, permodalan, pasar dan lainnya.”<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Sakdiah, SE, Kasie Pembinaan dan Pengawasan pada tanggal 22 agustus 2019

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan pelaku UMKM berinisial S, Jenis usaha Kerupuk Tempe. Pada tanggal 14 Januari 2019

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas tersebut kita mengetahui bahwa Disperindagkop terus melakukan program-program untuk mensejahterakan masyarakat Kota Langsa dalam hal kemiskinan dan memajukan para pelaku UMKM Kota Langsa.

### **3.6 Kendala Yang Menjadi Faktor Penghambat Disperindagkop Dalam Meningkatkan UMKM**

Dalam melaksanakan Pengembangan Industri Kecil Menengah di Kota Langsa Disperindagkop masih memiliki beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah:

1. Disperindagkop kurang aktif dalam melaksanakan pembinaan Industri Kecil Menengah, karena masih banyak UMKM yang belum diberi pembinaan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan penyuluhan dan pembinaan UMKM.
3. Dana yang tersedia masih kurang, sehingga banyak Industri kecil menengah yang belum bisa dijangkau dan dibantu oleh Disperindag.
4. Bantuan peralatan yang diberikan kadang tidak di gunakan.

Berdasarkan Pada Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2009-2011 terdapat permasalahan eksternal yang antara lain :

1. Banyak pola-pola bantuan teknik yang kurang efektif, antara lain karena penerapan pola umum tersebut secara atas-bawah (*top-down*) kurang mempertimbangkan aspek kelayakannya menurut kondisi spesifik obyek binaan di lapangan, serta kurang konsistennya dukungan sumberdaya dan lemahnya manajemen.
2. Kurangnya pendekatan pemecahan masalah pengembangan secara komprehensif, dengan konsekuensi
3. Belum efektifnya mekanisme bawah-atas di lapangan.
4. Banyak program pemberdayaan, khususnya kegiatan pendidikan dan pelatihan banyak yang kurang memenuhi kebutuhan nyata dari obyek binaan di lapangan.
5. Intervensi pemerintah, termasuk sistem insentif yang ada sering kali kurang menyentuh kebutuhan sektor riil. Pengembangan sistem insentif baru sering terkendala oleh cara pandang sempit dan kepentingan jangka pendek, serta kekhawatiran akan penyalah-gunaan karena lemahnya aspek pengawasan.
6. Masih adanya keengganan di sebagian masyarakat UMKM untuk melakukan perubahan yang bersifat modernisasi dikarenakan oleh hambatan cultural dan tingkat pendidikan.
7. Sering terlupakannya cara pendekatan rekayasa social dalam melakukan kegiatan transformasi sosial terhadap obyek binaan (UMKM) di daerah.

8. Kurangnya pola pikir konseptual-komprehensif dalam penyusunan program maupun pemecahan masalah, sehingga banyak langkah pembinaan kurang berhasil-guna.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pelaku UMKM dengan berinisial M menyatakan:

“Apabila dilihat dari permasalahan secara umum tidak terletak pada industri kecil dan menengah, namun terletak pada tingkat pemahaman dari pemerintah atau pemberi bantuan peningkatan industri kecil dan menengah yang tidak sesuai dengan karakteristik dan sifat dari sistem dan mekanisme industri kecil dan menengah tersebut. Oleh karena itu, dalam refleksi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyatakan adanya ketidakpahaman antara pemerintah dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil dan menengah, sehingga mengakibatkan bantuan modal dan teknis sering salah sasaran dan tidak dapat menyelesaikan masalah.”<sup>65</sup>

Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan bahwa teknis yang dilakukan oleh pemerintahan salah, karena sering salah sasaran, seharusnya pihak pemerintah benar-benar menyeleksi sebelum memberikan bantuan kepada pelaku UMKM agar tidak salah sasaran untuk memberikan bantuan kepada industri kecil

### **3.7 Upaya Disperangkop Kota Langsa Dalam Menghadapi Masalah**

#### **Yang Ada Untuk Kedepannya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Perindustrian, Disperindagkop melakukan beberapa upaya untuk mengembangkan UMKM di Langsa, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Pelaku UMKM dengan inisial M. pada tanggal 14 Januari 2019

- a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
- b. Bantuan Permodalan Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank.
- c. Pelatihan Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
- d. Mengembangkan Promosi Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan Industri besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.

Mengembangkan Kerjasama yang Setara Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UMKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan mengenai Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Langsa, maka dapat disimpulkan bahwa Peran yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Langsa, dalam pemberdayaan dilakukan dengan bimbingan pelatihan untuk pelaku UMKM dan juga pemberian bantuan alat produksi guna peningkatan hasil produksi. Selain itu juga Disperindagkop ikut dalam mempromosikan produk dan informasi yang dilakukan seperti pada ajang pameran dan acara-acara besar yang melibatkan pelaku UMKM yang ada di kota langsa.

Faktor penghambat dalam peran Disperindagkop dalam peningkatan adalah masih banyaknya masyarakat yang masih belum mengenal produk hasil UMKM dan juga pelaku bisnis yang tidak terdaftar dan tidak mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Disperindagkop, sehingga menyebabkan belum tercapainya tujuan Disperindagkop secara sempurna yaitu mensejahterakan masyarakat.

#### **3.8 Saran**

Pemerintah hendaknya meningkatkan pemberian pembinaan yang berdifat berkelanjutan baik berupa bantuan pelatihan oleh instruktur berpengalaman maupun modal usaha. Selain itu Pemerintah perlu lebih sering melakukan

pengawasan dan monitoring terhadap pelaku UMKM dan seminar sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM haruslah bisa lebih berinovatif dalam memberikan program pembinaan. Disperindagkop dapat memberikan penyuluhan seperti diantaranya dengan melakukan pelatihan pemasaran melalui internet karena teknik pemasaran melalui media ini efektif untuk menjangkau seluruh masyarakat. Dalam hal ini diperlukan adanya pelatihan disebabkan sebagian besar pelaku UMKM belum menguasai cara menggunakan internet untuk memasarkan produk mereka dengan menarik.

Dan yang terakhir adalah mengenai bantuan peralatan yang diberikan oleh pemerintah. Dimana terkadang bantuan alat tersebut tidak cocok dengan jenis usaha pelaku UMKM dan masih adanya pelaku UMKM yang malah tidak menggunakan alat bantuan yang telah diberikan. Sebagian kecil lainnya malah menjual alat bantuan tersebut.

## Lampiran

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja peran disperindagkop dalam meningkatkan produktivitas UMKM?
2. Apa tujuan Disperindagkop dalam meningkatkan UMKM?
3. Apakah ada usaha yang dibina oleh Disperindagkop?
4. Apakah ada pengawasan pelatihan UMKM?
5. Program-program pemberdayaan seperti apa yang dilaksanakan Disperindagkop dalam meningkatkan UMKM kota Langsa
6. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh disperindagkop dalam menjalankan tugasnya?
7. Bagaimana upaya Disperindagkop dalam menghadapi kendala-kendala yang ada?
8. Bagaimana menampilkan produk-produk UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya.

## Lampiran





PERNYATAAN ADMINISTRASI  
PENDIRIAN KOPERASI PRIMA

1. SURAT PERMOHONAN
2. DAFTAR NAMA RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI YANG DITANDAI OLEH PESERTA PENDIRIAN
3. BUKTI AKRA RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI
4. SIARAN PENGURUS DAN PENGANGGARAN
5. DAFTAR KEANGGOTAAN KOPERASI DAN PENGANGGARAN
6. BUKTI BUKTI KOPERASI KOPERASI
7. BUKTI BUKTI KOPERASI KOPERASI
8. BUKTI BUKTI KOPERASI KOPERASI
9. BUKTI BUKTI KOPERASI KOPERASI
10. BUKTI BUKTI KOPERASI KOPERASI
11. BUKTI BUKTI KOPERASI KOPERASI
12. BUKTI BUKTI KOPERASI KOPERASI
13. BUKTI BUKTI KOPERASI KOPERASI
14. BUKTI BUKTI KOPERASI KOPERASI
15. BUKTI BUKTI KOPERASI KOPERASI
16. BUKTI BUKTI KOPERASI KOPERASI
17. BUKTI BUKTI KOPERASI KOPERASI
18. BUKTI BUKTI KOPERASI KOPERASI
19. BUKTI BUKTI KOPERASI KOPERASI
20. BUKTI BUKTI KOPERASI KOPERASI

Lampiran foto wawancara dengan pelaku UMKM Kota Langsa



